

KATALOG PROGRAM GRAKTI BERBASIS KARAKTERISTIK WILAYAH

Bab ini merupakan katalog program konseptual yang menghubungkan hasil klasifikasi wilayah GRAKTI dengan paket intervensi yang dapat dipilih pemerintah daerah. Seluruh contoh program perlu diselaraskan dengan PP Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah serta peraturan sektoral terkait.

7.1 Katalog Program Wilayah Perdesaan

Bagian ini menyajikan contoh paket program untuk wilayah perdesaan berdasarkan karakteristik kewilayahan dan prinsip GRAKTI.

Program 1 : Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin

Tabel 7.1 Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD dan OPD terkait	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, Dan BPKAD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah perdesaan. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 2 : Pelayanan kesehatan DTPK melalui pelayanan bergerak, gugus pulau, dan telemedicine

Tabel 7.2 Pelayanan kesehatan DTPK melalui pelayanan bergerak, gugus pulau, dan telemedicine

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD dan OPD terkait	Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Komunikasi dan Informasi
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Pelayanan kesehatan DTPK melalui pelayanan bergerak, gugus pulau, dan telemedicine merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah perdesaan. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 3 : Beasiswa Siswa Miskin**Tabel 7.3 Beasiswa Siswa Miskin**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD dan OPD terkait	Dinas Pendidikan
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Beasiswa Siswa Miskin merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah perdesaan. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah

Program 4: Peningkatan Produktivitas Pertanian**Tabel 7.4 Peningkatan Produktivitas Pertanian**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD dan OPD terkait	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Peningkatan Produktivitas Pertanian merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah perdesaan. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah

Program 5: Penguatan BUMDes**Tabel 7.5 Penguatan BUMDes**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Penguatan BUMDes merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah perdesaan. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 6: Air Minum dan Sanitasi**Tabel 7.6 Air Minum dan Sanitasi**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD	Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup.
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Air Minum dan Sanitasi merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah perdesaan. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Tabel 7.7 Program Air Minum dan Sanitasi merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD	Dinas Perumahan dan Permukiman
Kewenangan	Provinsi

Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.
----------------	--

Program 7 : Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah perdesaan. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 8: Digitalisasi Pelayanan Publik

Tabel 7.8 Digitalisasi Pelayanan Publik

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD dan OPD terkait	Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Digitalisasi Layanan Publik merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah Perdesaan. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah

Program 9: Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan**Tabel 7.9 Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD dan OPD terkait	Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Bappeda, dan BPKAD
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah Perdesaan. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah

7.2 Katalog Program Wilayah Perkotaan

Bagian ini menyajikan contoh paket program untuk wilayah perkotaan berdasarkan karakteristik kewilayahan dan prinsip GRAKTI.

Program 1: Penataan Permukiman**Tabel 7.10 Penataan Permukiman**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD	Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas PUPR
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Penataan Permukiman merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah perkotaan. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 2: Pelatihan Kerja**Tabel 7.11 Pelatihan Kerja**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Pelatihan Kerja merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah perkotaan. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 3: Penguatan UMKM**Tabel 7.12 Penguatan UMKM**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD	Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Penguatan UMKM merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah perkotaan. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 4: Pangan Murah**Tabel 7.13 Pangan Murah**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD	Dinas Ketahanan Pangan
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Pangan Murah merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah perkotaan. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

7.3 Katalog Program Wilayah Pesisir

Bagian ini menyajikan contoh paket program untuk wilayah pesisir berdasarkan karakteristik kewilayahan dan prinsip GRAKTI.

Program 1: Penguatan Perikanan**Tabel 7.14 Penguatan Perikanan**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Penguatan Perikanan merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah pesisir. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 2: Konservasi Pesisir**Tabel 7.15 Konservasi Pesisir**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Konservasi Pesisir merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah pesisir. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 3: Penguatan Rantai Dingin Perikanan (Cold Storage)**Tabel 7.16 Penguatan Rantai Dingin Perikanan (Cold Storage)**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Cold Storage merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah pesisir. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 4: Hilirisasi dan Pengelolaan Hasil Perikanan**Tabel 7.17 Hilirisasi dan Pengelolaan Hasil Perikanan**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Hilirisasi dan Pengelolaan Hasil Perikanan merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah pesisir. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 5: Diversifikasi Mata Pencaharian Masyarakat Pesisir**Tabel 7.18 Diversifikasi Mata Pencaharian Masyarakat Pesisir**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Diversifikasi Mata Pencaharian Masyarakat Pesisir merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah pesisir. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 6: Adaptasi dan Perlindungan Masyarakat Pesisir**Tabel 7.19 Adaptasi dan Perlindungan Masyarakat Pesisir**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas LH, BPBD
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Adaptasi dan Perlindungan Masyarakat Pesisir merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah pesisir. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 7: Penguatan Ekonomi Perempuan Pesisir**Tabel 7.20 Penguatan Ekonomi Perempuan Pesisir**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas LH, BPBD
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Penguatan Ekonomi Perempuan Pesisir merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah pesisir. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 8: Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan**Tabel 7.21 Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD dan OPD terkait	Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Bappeda, dan BPKAD
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah Pesisir. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 9: Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin**Tabel 7.22 Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD dan OPD terkait	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, Dan BPKAD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah Pesisir. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

7.4 Katalog Program Wilayah Pulau Kecil

Bagian ini menyajikan contoh paket program untuk wilayah pulau kecil berdasarkan karakteristik kewilayahan dan prinsip GRAKTI.

Program 1: Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah**Tabel 7.23 Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD	Dinas Perhubungan.
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah pulau kecil. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 2: Internet Desa**Tabel 7.24 Internet Desa**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD	Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Internet Desa merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah pulau kecil. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 3: Penyediaan Listrik dan Energi Terbarukan**Tabel 7.25 Penyediaan Listrik dan Energi Terbarukan**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD	Dinas ESDM
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Penyediaan Listrik dan Energi Terbarukan merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah pulau kecil. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 4 : Pelayanan kesehatan DTPK melalui pelayanan bergerak, gugus pulau, dan telemedicine

Tabel 7.26 Pelayanan kesehatan DTPK melalui pelayanan bergerak, gugus pulau, dan telemedicine

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD dan OPD terkait	Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Komunikasi dan Informasi
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Pelayanan kesehatan DTPK melalui pelayanan bergerak, gugus pulau, dan telemedicine merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah Pulau Kecil. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 5: Air Minum dan Sanitasi**Tabel 7.27 Air Minum dan Sanitasi**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD	Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup.
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Air Minum dan Sanitasi merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah Pulau Kecil. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 6: Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan**Tabel 7.28 Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD dan OPD terkait	Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Bappeda, dan BPKAD
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah Pulau Kecil. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 7 : Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin**Tabel 7.29 Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD dan OPD terkait	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, Dan BPKAD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah Pulau Kecil. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

7.5 Katalog Program Wilayah Tertinggal

Bagian ini menyajikan contoh paket program untuk wilayah tertinggal berdasarkan karakteristik kewilayahan dan prinsip GRAKTI.

Program 1: Infrastruktur Dasar (Jalan, Air Bersih dan Sanitasi, Listrik, Komunikasi, Rumah Layak Huni)

Tabel 7.30 Infrastruktur Dasar (Jalan, Air Bersih dan Sanitasi, Listrik, Komunikasi, Rumah Layak Huni)

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD	Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas ESDM
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Infrastruktur Dasar merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah tertinggal. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 2: Peningkatan SDM**Tabel 7.31 Peningkatan SDM**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD	Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Peningkatan SDM merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah tertinggal. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 3: Pelayanan kesehatan DTPK melalui pelayanan bergerak, gugus pulau, dan telemedicine

Tabel 7.32 Pelayanan kesehatan DTPK melalui pelayanan bergerak, gugus pulau, dan telemedicine

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD dan OPD terkait	Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Komunikasi dan Informasi
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Pelayanan kesehatan DTPK melalui pelayanan bergerak, gugus pulau, dan telemedicine merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah tertinggal. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 4: Digitalisasi Pelayanan Publik**Tabel 7.33 Digitalisasi Pelayanan Publik**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD dan OPD terkait	Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Digitalisasi Pelayanan Publik merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah tertinggal. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah

Program 5: Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan**Tabel 7.34 Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD dan OPD terkait	Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Bappeda, dan BPKAD
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah tertinggal. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 6 : Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin**Tabel 7.35 Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD dan OPD terkait	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, Dan BPKAD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah tertinggal. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

7.7 Katalog Program Wilayah Perbatasan

Bagian ini menyajikan contoh paket program untuk wilayah perbatasan berdasarkan karakteristik kewilayahan dan prinsip GRAKTI.

Program 1: Pos Layanan Terpadu**Tabel 7.36 Pos Layanan Terpadu**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD	Bappeda dan Badan Pengelolaan Perbatasan
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Pos Layanan Terpadu merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah perbatasan. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 2: Ekonomi Perbatasan**Tabel 7.37 Ekonomi Perbatasan**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD	Bappeda, Dinas Pengelolaan Perbatasan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Ekonomi Perbatasan merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah perbatasan. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 3: Konektivitas wilayah perbatasan**Tabel 7.38 Konektivitas wilayah perbatasan**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD	Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas PUPR
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Konektivitas Wilayah Perbatasan merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah perbatasan. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 4: Pelayanan kesehatan DTPK melalui pelayanan bergerak, gugus pulau, dan telemedicine

Tabel 7.39 Pelayanan kesehatan DTPK melalui pelayanan bergerak, gugus pulau, dan telemedicine

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD dan OPD terkait	Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Komunikasi dan Informasi
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Pelayanan kesehatan DTPK melalui pelayanan bergerak, gugus pulau, dan telemedicine merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah Perbatasan. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 5: Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan**Tabel 7.40 Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD dan OPD terkait	Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Bappeda, dan BPKAD
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah Perbatasan. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Program 6 : Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin**Tabel 7.41 Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin**

Tujuan	Meningkatkan kualitas pembangunan sesuai karakteristik wilayah.
Output	Kegiatan terlaksana sesuai target.
Outcome	Kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan meningkat.
Leading OPD dan OPD terkait	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, Dan BPKAD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kewenangan	Provinsi
Catatan GRAKTI	Program dipilih melalui Decision Engine berdasarkan karakteristik wilayah.

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin merupakan contoh intervensi yang dapat diprioritaskan pada wilayah perbatasan. Dalam implementasinya, rincian kegiatan, target penerima manfaat, kebutuhan anggaran, dan indikator kinerja disesuaikan dengan hasil analisis IKIW, kondisi lokal, serta arah kebijakan pembangunan daerah.